

Bentuk Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahannya

Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Dengan penyempurnaan kurikulum tahun 2000, menurut Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000 materi Pendidikan Kewiraan di samping membahas tentang PPBN juga membahas tentang hubungan antara warga negara dengan negara. Diharapkan dengan adanya buku ini dapat meningkatkan pemahaman dasar materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan serta sebagai pedoman bagi mahasiswa.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Plato yang melalui percakapannya dengan banyak orang; negeri yang diperintah oleh filsuf alias pemerintahan yang berfilsafat merupakan negara yang paling benar. Filsuf adalah orang yang mencintai kebenaran. Dia adalah orang yang dapat melihat bentuk sejati yang menjauhkan diri dari urusan duniawi dengan mata hati bukan dengan mata tubuh, bentuk sejati yang menjauhkan diri dari urusan duniawi ini disebut dengan 'ide'. Karena itu, Plato mengklaim bahwa hanya filsuf yang dapat melihat ide saja yang harus menjadi penguasa.

This text maintains a problem and policy oriented approach to development economics. It focuses on people and government in developing countries.

Awal milenium baru adalah kesempatan yang sangat pas untuk mengetengahkan prestasi masa lalu dan kondisi saat ini dari Hubungan Internasional (HI). Namun, juga ada alasan lain, dan alasan yang mempunyai dasar intelektual yang cukup kuat: kelangkaan yang mengejutkan akan upaya inventarisasi disiplin ilmu ini dalam sebagian besar sejarah singkatnya. Karya-karya yang telah diterbitkan dalam beberapa dekade terakhir adalah panduan singkat pada materi subyek (Groom and Light, 1994; Light and Groom, 1985), atau memiliki ambisi ensiklopedis untuk mencakup tidak hanya pendekatan analitis utama dalam disiplin HI tetapi juga semua perkembangan politik, peristiwa dan tokoh-tokoh terkait yang mencirikan hubungan internasional modern melalui wilayah empiris (Krieger, 1993).

Al-Quran dan Prinsip Ketatanegaraan: Studi Kisah Nabi Sulaiman as.

Ragam Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara-negara di Dunia

Social Science and Power in Indonesia

Pengantar Hukum Indonesia

ISLAM RADIKAL DAN MODERAT Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia

Untuk versi cetak, silakan kunjungi link: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2021/2/pasti-bisa-pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-untuk-smpmts-kelas-ix#.YXEYjFVBxhE
Seri buku PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan harian dan ulangan akhir semester. Buku yang membantu siswa mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. • Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang dibahas secara gamblang dan mudah dipahami (belajar melalui contoh). • Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif di bagian akhir bab untuk menguji pemahaman materi di setiap bab. • Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar Semester 2 sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Seri PASTI BISA membantu mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan harian dan ulangan akhir semester.

The premise of Social Science and Power in Indonesia is that the role and development of social sciences in Indonesia over the past fifty years are inextricably related to the shifting requirements of power. What is researched and what is not, which frameworks achieve paradigmatic status while others are marginalized, and which kinds of social scientists become influential while others are ignored are all matters of power. These and other important themes and issues are critically explored by some of Indonesia's foremost social scientists in this seminal work.

Buku ini merupakan revisi dari buku Ilmu Negara: Buku panduan mahasiswa, Jakarta, yang diterbitkan atas kerja sama APTIK dan penerbit Gramedia Pustaka utama, tahun 1992. Perubahan Paradigma, dari paradigma teknokratis struktural ke paradigma humanis partisipatoris, merupakan hal yang menarik untuk dibaca dan disimak di dalam buku ini. Lebih menarik lagi, telah terjadi perubahan paradigma negara hukum. Negara hukum kesejahteraan dengan segala variannya, dari negara hukum liberte-liberal, negara hukum formal, negara hukum materiil, negara hukum kesejahteraan, negara hukum sosialis, negara hukum neoliberal, hingga negara hukum sosial, telah mengalami anomali dan krisis.

Paradigma negara hukum yang saat ini sedang berkuasa adalah negara hukum pembangunan. Apa dan seperti apa negara hukum pembangunan itu? Jawaban tersaji di dalam buku ini! Buku ini disertai dengan arahan kompetensi dasar yang diharapkan dari pembaca. Dengan demikian pembaca dengan mudah menyimak isi dari buku. Buku ini sangat cocok dibaca oleh para pemerhati negara, politisi dan mahasiswa fakultas hukum dan ilmu politik.

Dalam konteks pengembangan dimaksud para pengajar setiap mata kuliah harus menggunakan berbagai literature yang sejalan dengan tuntutan kurikulum pendidikan tinggi hukum. Akan tetapi tuntutan tersebut tidaklah mudah terpenuhi, penyebabnya ialah keterbatasan daya beli dan ketersediaan literature itu sendiri. Dalam mata kuliah hukum tata negara khususnya, sesungguhnya telah banyak literature yang terbit akan tetapi dengan mempertimbangkan materi perkuliahan yang akan disampaikan sekaligus memudahkan mahasiswa mendalami pokok-pokok materi yang tersebar dalam berbagai literature itu, penulis terdorong untuk menyusun buku ini sebagai himpunan materi minimal yang bersumber dari berbagai literature yang telah ada sebelumnya. Menyadari betapa luasnya ruang lingkup materi hukum tata negara, penulis menyusun buku ini dalam dua jilid. Pada jilid satu ini yang terdiri dari lima bab akan mengetangahkan uraian tentang pendahuluan, asas-asas hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan serta hak asasi manusia. Sementara pada jilid kedua direncanakan menguraikan antara lain: konstitusi, kelembagaan negara, pemilihan umum, partai politik, otonomi daerah.

ILMU NEGARA

*Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia
Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi
Ilmu Negara (Kajian Hukum dan Kenegaraan)*

Hans Kelsen menerbitkan buku ini pada 1934. Pada waktu itu pengaruh neo-Kantian terhadap karyanya mencapai puncaknya. Fase sebelumnya, fase ‘konstruktivis,’ yang kelihatan jelas dalam karyanya Habilitationsschrift, terbit pada 1911, telah diganti dengan usahanya, sekalipun tidak teratur, untuk memberikan sesuatu yang mirip dasar neo-Kantian pada teorinya selama dekade berikutnya. Setelah 1934, Kelsen mulai memperkenalkan konsep-konsep dari kumpulan

empiris, misalnya dengan memasukkan analisis kausalitas Hume dalam beberapa karyanya, dan berpendapat bahwa kategori apriori berkenaan dengan ausalitas merupakan langkah yang keliru, melebihi Hume. Terakhir, setelah 1960, Kelsen tidak lagi menonjol-nonjolkan Pure Theory of Law sebagaimana yang kita ketahui dari fase kedua dan ketiganya. Kelsen memperkenalkan elemen-elemen teori hukum ketetapan atau teori hukum 'kehendak' sebagai penggantinya.

Ilmu negara masih menduduki tempat di fakultas hukum, mata kuliah ini diberikan pada tingkat pertama (persiapan), sebagai mata kuliah pengantar untuk mata kuliah Hukum Tata Negara (Hukum Negara Positif). Ilmu negara dianggap sebagai ilmu murni (pure science) yang menyediakan dasar-dasar teoritis bagi ilmu negara yang dipandang sebagai ilmu yang praktis (applied science). Sebagai ilmu murni, ilmu negara menyediakan bahan-bahan mentah yang melengkapinya dan yang di pergunakan oleh ilmu Hukum Negara. Pada Perguruan Tinggi Hukum (Rechtshogeschool) di zaman Hindia Belanda dikuliahkan semacam Ilmu Negara (Historische Ontwikkeling der hedendaagsche staatsinstellingen = perkembangan historis dari lembaga-lembaga kenegaraan di masa itu) yang dianggap sebagai mata kuliah pengantar dari Ilmu Hukum Negara Positif, selanjutnya dikenal seperti sekarang ini, yaitu "Ilmu Negara".

Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yaitu, "panca" berarti lima dan "sila" berarti prinsip atau asas. Jadi pancasila adalah prinsip pedoman yang menjadi landasan masyarakat Indonesia, dan sumber hukum Negara. Istilah pancasila telah dikenal sejak dulu, yaitu digunakan sebagai acuan moral atau etika dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari.

Misalnya, dari karya-karya pujangga besar Indonesia semasa berdirinya kerajaan majapahit yang dilukiskan dalam tulisan empu prapanca tentang Negara Kertagama dan empu tantular dalam bukunya sutasoma (Windiseptiani, 2016). Kenyataan hidup berbangsa dan bernegara tidak dapat terpisahkan dari sejarah masa lampau, terlebih lagi bagi kita bangsa Indonesia. Demikian pula dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di dalamnya Pancasila sebagai dasar negaranya. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebenarnya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Nilai-nilai tersebut kemudian digali oleh para pendiri negara.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, buku ini selesai kami susun. Buku ini membahas bentuk negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Agar memudahkan kalian dalam mempelajari buku ini, kami sampaikan dulu mengenai pengertian negara, bermacam bentuk negara, bentuk pemerintahan, ataupun sistem pemerintahan. Hal itu dimaksudkan agar kalian lebih memahami istilah-istilah mengenai bentuk negara dan pemerintahan.

Balai Pustaka

Pendidikan Kewarganegaraan

sebuah pengantar dan panduan

Negara dan korupsi

Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX

Negara, Kedaulatan dan Wilayah: Handbook Hubungan Internasional

Buku ini memotret berbagai gerakan Islam radikal teraktual di tanah air, serta Islam moderat sebagai antitesa serta arus utama paham Islam di tanah air. Tulisan dalam buku ini, berasal dari banyak sumber terpercaya dan catatan lapangan penulisnya sebagai peneliti kehidupan keagamaan di Balitbang dan Diklat Kementerian Agama. Melalui riset yang panjang, penulis buku ini berhasil mendeskripsikan 6 eksemplar organisasi Islam radikal yaitu: JI, JAT, HTI, ISIS, JAD, dan NII KW9. Meski mayoritas bangsa ini tidak menyetujui pendirian negara berdasarkan agama, namun gagasan untuk mendirikan negara berdasarkan agama Islam tidak pernah padam. Informasi dalam buku ini penting untuk dibaca bagi mereka yang cinta tanah airnya.

Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang universal, peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Prinsip konstitusionalisme modern pada pokoknya menyangkut pembatasan kekuasaan (limited government). Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yakni hubungan antara pemerintahan dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan lainnya. Karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., guru besar fakultas hukum UI dan Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2003-2008 ini membahas sejarah awal konstitusi di Indonesia demokrasi dan nomokrasi, prinsip kekuasaan dan bagaimana penerapan ideal sebuah konstitusi. Buku ini adalah sebuah pengantar yang lebih komprehensif memahami konstitusi dan konstitusionalisme.

Sebagai bangsa yang terus maju dan berkembang, hukum tata negara yang dimiliki oleh Indonesia juga terus berubah mengikuti dinamika di segala bidang. Karena itu, buku ini berupaya memberikan paparan komprehensif mengenai hukum tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amendemen UUD 1945 sejak 1992-2002. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Perkembangan sosial masyarakat saat ini semakin hari semakin berkembang. Tingginya kasus-kasus hukum yang menjerat beberapa tokoh penting yang sering diberitakan di televisi, membuat masyarakat luas bertanya-tanya mengenai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagian masyarakat masih bingung mengenai cara kerja dalam sistem hukum nasional. Sebagian yang fanatik atas dasar agama dan suku, memberikan cara pandang yang berbeda terhadap putusan hakim yang sebenarnya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Rasa penasaran sebagian masyarakat yang ingin mengetahui seluk-beluk hukum di

Indonesia, belum sepenuhnya terjawab secara tuntas. Media-media di televisi, di internet, dan media yang lain, belum sepenuhnya secara rinci memberikan penjelasan tuntas mengenai hukum. Maka dari itu, diperlukan suatu terobosan yang mudah untuk menjadi pedoman bagi mereka yang masih bertanya-tanya akan mekanisme hukum di tanah air. Buku "Risalah Mahasiswa Hukum" merupakan suatu solusi yang dimaksud. Didalamnya merupakan kumpulan materi hukum yang biasa di pelajari oleh mahasiswa-mahasiswa hukum. Penjabarannya memang tidak terlalu mendalam, tapi sangat cukup untuk menjawab kegelisahan sebagian kalangan yang ingin mengenal lebih dekat hukum di Indonesia.

Catatan pinggir 3

Pengantar Teori Hukum

Capita selecta Aspek-aspek arkeologi Indonesia

Economic Development

Handbook Hubungan Internasional

Buku ini merupakan kumpulan 160 esai pendek Goenawan Mohamad yang pernah dimuat majalah Tempo dari Januari 1986 sampai Februari 1990. Diawali dengan esai berjudul " Ding " (4 Januari 1986) sampai yang terakhir " Asongan " (24 Februari 1990). Esai-esai yang dikenal sebagai Catatan Pinggir itu berbicara beragam hal, bahkan hampir semua hal yang dekat dengan peristiwa di masyarakat dalam kurun waktu empat tahun itu: tentang kecemasan, kebebasan, kekuasaan, kemerdekaan, keserakahan, kebahagiaan, demokrasi. Mengenai topik yang disebut terakhir, William Liddle, dalam Kata Pengantar untuk buku ini, mengatakan kiranya jelas bahwa Goenawan sangat menyakini demokrasi sebagai jenis pemerintahan yang terbaik bagi negara kebangsaan Dunia Ketiga seperti Indonesia. Tetapi dia tidak berpretensi seolah-olah demokrasi dengan sendirinya mampu menyelesaikan segala persoalan.... Goenawan Mohamad, kata Liddle, adalah burung langka dalam sangkar intelektual modern Indonesia. Dia menolak tegas pengkotakan Timur-Barat. Dalam sejumlah Catatan Pinggir ini, kata Liddle, dikotomi Timur-Barat beberapa kali ditampik Goenawan.

Ilmu Administrasi Pemerintahan adalah kumpulan pemikiran yang menghubungkan antara Kekuasaan Politik (Political Power) dan Proses-proses Administrasi Pemerintahan (The Governmental Process). Fenomena sosial yang menarik minat para ilmuwan politik untuk mengembangkan pemikiran ini bahwa perebutan kekuasaan, begitu juga bagaimana kekuasaan itu didistribusikan dan dipertahankan ada di setiap sistem politik dan sistem pemerintahan. Dalam praktiknya, fenomena kekuasaan itu direalisasikan dalam dalam sistem administrasi pemerintahan tertentu sesuai dengan filsafat, norma, kebiasaan dan pemikiran politik yang berkembang secara universal ataupun secara lokal di tempat fenomena itu berada. Oleh karena itu, bisa saja sistem administrasi pemerintahan di suatu negara berkembang berbeda dengan sistem yang sama di negara-negara lain di dunia meskipun negara tersebut menganut filsafat politik, misalnya demokrasi, yang bersifat universal. Misalnya, mengapa sebuah fenomena perebutan kekuasaan politik untuk

jabatan presiden di Amerika Serikat berbeda dengan fenomena yang sama di Swiss meskipun kedua negara tersebut sama-sama berbentuk negara federal, mempunyai sistem politik demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer. Fenomena serupa juga terjadi di tempat lain. Hal ini bisa terjadi karena faktor lokalitas yang telah disebutkan. Itulah sebabnya mengapa ada persamaan fenomena yang universal tetapi juga ada perbedaan yang bersifat lokal. Ilmu ini mempelajari persamaan dan perbedaan seperti itu, dan menemukan pola-pola tertentu yang muncul karenanya. – Penulis

Buku Ajar ini berisikan 8 BAB. Materi dalam Buku ajar ini merupakan hasil pengayaan buku referensi dan tinjauan hasil penelitian terbaru dibidang Organisasi, e-Governance, Manajemen Pemerintahan, Strategi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance dan Good Government), e- Public Service, Resiprokal Birokrasi, dan Manajemen Pemerintahan daerah. Isu-isu terbaru Organisasi Modern, dan Manajemen Pemerintahan modern yang berbasis TI 4.0 yang diterapkan dalam organisasi dan manajemen pemerintahan. Dalam buku ini pula dibahas terkait Gap atau Black Box e-public service ditingkat lokal dan yang terakhir dibahas soal ETIKA dan Norma Manajemen pemerintahan dan Leadership Government. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan menambah wawasan yang lebih luas bagi pembaca. Penulis dapat menyelesaikan buku ini karena ada bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Halmahera sebagai teman sejawat satu prodi yang telah memberikan pikiran-pikiran yang membangun untuk penerbitan buku ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada ketua program studi Ilmu Pemerintahan Herman Sidete, yang turut memberikan buku referensi kepada penulis untuk melengkapi isi buku ini. Penulis sampaikan terima kasih kepada teman sejawat bapak Bonny Datty, Usak, dan Kepala LPPM-P UNIERA yang turut mendorong dan memberikan pikiran-pikiran dalam buku penulis. Penulis mengutip peribahasa ” Tak Ada Gading Yang Tak Retak ” . Penulis berusaha untuk menghindari kesalahan namun kesalahan dan kekurangan buku ini pasti ditemukan pembaca. itu sebabnya, penulis berharap saran dan kritikan yang membangun dapat disampaikan. Dengan hati yang terbuka penulis akan menerima saran dan kritikan dari pembaca. Pada akhirnya penulis mengutip peribahasa ” Lebih Baik Teguran Yang Nyata Daripada Kasih Yang Tersembunyi ” . Saran dan kritikan dari pembaca adalah untuk kebaikan penulis. Secara khusus penulis sampaikan banyak terima kasih kepada pembaca sebagai Generasi Pembelajar, Generasi Unggul, Generasi Kreatif Dan Inovatif.

Sistem Pemerintahan Indonesia merupakan sebuah kesatuan perihal bagaimana sub-subsistem dalam pemerintahan Indonesia seperti Lembaga eksekutif (presiden), legislatif (MPR/DPR/DPD), yudikatif (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial) ditambah dengan komisi-komisi serta badan-badan penunjang pemerintah serta pemerintah daerah hingga desa, bekerja sama saling mengaitkan satu sama lain demi terwujudnya alur birokrasi maupun kebijakan yang berguna bagi sebesar-besarnya pencapaian cita-cita bangsa Indonesia. Buku ini kemudian mencoba menghadirkan secara sistematis dan komprehensif terkait pengertian sistem, penjelasan dalam bentuk pengantar tentang pemerintahan dan negara, hingga Lembaga-lembaga seperti apa yang

menunjang konstelasi pemerintahan Indonesia baik sejak masa pemerintahan Soekarno, rezim orde baru, hingga masa reformasi. Buku ini diharapkan menjadi pengantar bagi para pembaca untuk mampu mengenali institusi-institusi ketatanegaraan yang menyokong sistem pemerintahan di Indonesia, agar kemudian pembaca dapat memaknai pemerintahan Indonesia sebagai suatu keniscayaan demi tercapainya efektivisme birokrasi dan alat pencapaian perjuangan sebagai amanat konstitusi.

Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 Regarding Marks and Geographical Indication = Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

kumpulan 160 esai pendek Goenawan Mohamad yang pernah dimuat majalah Tempo dari Januari 1986 sampai Februari 1990
Menuju Masyarakat Madani

Bentuk Negara dan Pemerintahan RI

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA DAN PRANCIS

Setiap negara, tentu mempunyai sistem pemerintahan tersendiri. Namun, tak jarang ada kemiripan antara satu dengan yang lain. Hal ini dapat dipengaruhi oleh sejarah terbentuknya suatu negara. Afrika Selatan misalnya. Negara itu menganut sistem pemerintahan parlementer karena wilayahnya pernah dikuasai Inggris yang menganut sistem pemerintahan tersebut. Lalu, bagaimana dengan negara lainnya? Nah, buku di hadapan Anda ini menjelaskan mengenai pengertian dan macam-macam sistem pemerintahan, bentuk-bentuk pemerintahan, serta pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara. Setidaknya, lebih dari 20 negara yang dibahas secara tuntas di sini. Negara mana sajakah? Tunggu apa lagi, segera miliki buku ini dan dapatkan jawabannya!

Negara merupakan suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban masyarakat pada suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Beberapa aspek negara yang dimaksud adalah negara merupakan organisasi dari sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah. Negara sebagai asosiasi yang bertindak berdasarkan undang-undang yang dibuat pemerintah. Fungsi negara sebagai pemelihara ketertiban masyarakat umum, negara diberi kekuasaan yang bersifat memaksa oleh undang-undang untuk menjaga ketertiban masyarakat. Negara dalam menjalankan tatanan pemerintahannya membutuhkan adanya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sebagai sistem hubungan antarlembaga negara. Sedangkan pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kepentingan negara. Sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Sistem pemerintahan pada suatu negara akan berjalan efektif apabila sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter dan kondisi sosial dan politik negara. Apabila sistem pemerintahan yang digunakan tidak sesuai maka bisa dipastikan akan timbul kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan sendiri. Sistem pemerintahan dengan coraknya sangat dipengaruhi oleh sejarah negara masing-masing. Buku ini menguraikan perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Prancis. Buku digital ini berjudul "Filsafat Ilmu Sosial dan Hubungan Internasional", merupakan tulisan yang berisi tentang "buku pegangan ilmu hubungan internasional" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi

pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan Ilmu Sosial Politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berharap semoga konten yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Bentuk Negara dan Pemerintahan RIPT Balai Pustaka (Persero)

Why? The Republic (Plato)

Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan

Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan

Menanamkan Nilai-Nilai Karakter dan Budaya

Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme

Criticism on thought of Mochtar Lubis, journalist and author, on state and corruption in Indonesia.

Ulangan harian menjadi salah satu instrumen untuk pemahaman dan perkembangan akademik siswa. Selain itu, ulangan harian dapat membantu siswa untuk mempersiapkan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Adanya ulangan harian membuat siswa belajar secara mandiri dan memahami materi lebih dalam. Dengan demikian, pemahaman dan perkembangan akademik siswa menjadi meningkat. Buku All New Target Nilai 100 Ulangan Harian SMP Kelas VII merupakan pilihan tepat untuk menunjang siswa belajar secara mandiri dan memahami materi lebih dalam. Buku ini disusun berdasarkan kurikulum terbaru dari Kemdikbud. Siswa akan mendapatkan ringkasan materi, ulangan harian, serta ulangan akhir semester 1 dan 2. Semua disajikan dengan padat, jelas, dan mudah dipahami. Dengan keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa dalam menghadapi ulangan harian dan ulangan akhir semester. Selamat belajar! Buku persembahkan penerbit Cmedia Buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana, lugas, dan mudah dipahami, sehingga akan membantu para mahasiswa dalam mempelajarinya secara lebih cepat, mudah, dan praktis.

Hukum Tata Negara merupakan cabang dari Ilmu Hukum. Dari segi teori, Hukum Tata Negara (staatrecht) dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu staatrecht in ruimere zin (arti luas), dan staatrecht in engere zin (arti sempit), dimana dalam arti in engere zin inilah Hukum Tata Negara atau verfassungrecht yang dapat dibedakan antara pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Hukum Tata Negara dari segi Istilah biasanya juga dipersamakan dengan istilah law constitutional yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Konstitusi, walaupun ada juga yang membedakan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi. Hukum Tata Negara juga dapat dipelajari dari segi Hukum Tata Negara positif dan Hukum Tata Negara umum. Hukum Tata Negara positif mempelajari tentang norma-norma dasar yang berlaku di suatu wilayah dan waktu tertentu. Sementara Hukum Tata Negara umum mempelajari segala gejala ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata Negara

pada umumnya. Hal ini berkaitan pula dengan istilah lehre dan recht pada istilah verfassung yang mengindikasikan bahwa domain akademis Ilmu Hukum Tata Negara sangat luas jangkauan pembahasannya. Buku ini terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan dimulai dengan Bab I : Pendahuluan; Bab II : Ilmu Hukum Tata Negara; Bab III : Sumber-sumber Hukum Tata Negara; Bab IV : Konstitusi; Bab V : Lembaga dan Fungsi Kekuasaan Negara; Bab VI : Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan; dan Bab VII : Partai Politik dan Pemilihan Umum.

Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia

Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia

Membedah Keberagaman Umat Islam Indonesia

Ilmu Negara

Buku Ilmu negara : sebuah kajian dalam perspektif teori kenegaraan di indonesia ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

istilah negara diterjemahkan dari bahasa asing staat (bahasa belanda dan jerman). State (bahasa inggris), Etat (bahasa Prancis). istilah state mempunyai sejarah sendiri. istilah itu mula mula dipergunakan dalam abad ke-15 di eropa barat. nggapan uum yang diterima bahwa kata staat (state, etat) itu dialihkan dari kata bahasa latin status dan statum. secara etimologi kata status itu dalam bahasa latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegas dan tetap. jika praktik mengalihkan kata state itu dari kata status, maka doktrin mengenalnya untuk pertama kali terdapat dalam tulisan Nicolla Machiavelli yang lazimnya dianggap sebagai bapak ilmu politik modern. didalam bukunya yang berjudul "the pience", machiavelli memulai kalimat pertamanya dengan "semua negara dan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah ada dan yang sekarang menguasai manusia adalah republik atau kerajaan" machiavelli lah yang pertama kali mengenalkan istilah lo stato dalam kepustakaan ilmu politik. istilah ilmu negara terdiri atas 2 (dua) kata, ilmu dan negara. istilah ilmu dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengetahuan suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bidang pengetahuan. apabila menurut sjachran bahasa ilmu adalah sesuatu yang didapat dari pengetahuan, dan pengetahuan ini diperoleh dengan berbagai cara

Sebagai suatu langkah pemantapan atau penguatan sistem demokrasi (konsolidasi sistem demokrasi) salah satu periode yang harus dilewati dalam perubahan sistem ketatanegaraan dari otoritarian

sentralistik oligarkis menuju sistem ketatanegaraan demokratis desentralistik adalah melewati beberapa langkah eksperimentasi. Eksperimentasi tersebut, seperti infrastruktur demokrasi, perumusan perangkat hukum yang utamanya legislasi untuk mengawal jalannya proses perubahan sistem ketatanegaraan, serta paradigmatik uji coba sistem demokrasi. Eksperimentasi itu tentu diarahkan untuk membangun budaya demokrasi dalam konsolidasi sistem demokrasi. Dengan demikian, prasyarat penguatan atau peneguhan demokrasi melalui konsolidasi tidak hanya berpijak pada sistem demokrasi prosedural semata, melainkan menyangkut substansi demokrasi, yakni kultur demokrasi itu sendiri. Penulis memaparkan bahwa sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia proses menuju konsolidasi sistem demokrasi selalu diupayakan oleh setiap penyelenggara negara. Oleh karena itu, perubahan regulasi dan praktik politik mengalami percepatan yang tidak terprediksikan. Konsolidasi sistem demokrasi terus berjalan mengingat demokrasi sendiri bukanlah tujuan, melainkan cara untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan hal ini, buku Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia ini lebih banyak menyajikan aspek-aspek mendasar yang harus diperhatikan dalam membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis. Buku ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi mahasiswa dan siapa pun yang ingin mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Indonesia dalam rangka menuju konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia.

Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 Regarding Marks and Geographical Indication = Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis This book is in English and Indonesian = Buku ini Berbahasa Inggris dan Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan SMP VIII

Hukum Tata Negara Suatu Pengantar

All New Target Nilai 100 Ulangan Harian SMP Kelas VII

PENDIDIKAN PANCASILA

Sistem Pemerintahan Indonesia